

## KINERJA PELAKSANAAN PNPM PARIWISATA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA WISATA KEMBANGARUM DAN DESA WISATA PENTINGSARI KABUPATEN SLEMAN

Ninik Wahyuning Tyas<sup>1</sup> dan Asnawi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : [ninik.wahyuning.tyas@gmail.com](mailto:ninik.wahyuning.tyas@gmail.com)

**Abstrak:** Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang telah ada sejak dahulu. Di Indonesia sendiri, kemiskinan masih menjadi fenomena yang belum dapat dipungkiri. Fenomena kemiskinan ini pun juga dialami Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam. Salah satu obyek wisata yang saat ini berkembang pesat di Sleman adalah desa wisata. Dari 34 desa wisata yang terdapat di Sleman, terdapat dua desa yang berkembang pesat, yaitu dengan Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari. Sementara itu, pemerintah telah mencanangkan PNPM Pariwisata yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui adanya desa wisata. Oleh karena itu, tentunya diperlukan kajian mengenai kinerja PNPM Pariwisata dalam mengentaskan kemiskinan melalui pelaksanaan program desa wisata. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk dilakukan penelitian, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana kinerja pelaksanaan PNPM Pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman?”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga data yang didapatkan berasal dari kuesioner dengan menggunakan teknik sampling simple random sampling. Hasil penelitian ini berupa identifikasi program kegiatan PNPM Pariwisata, identifikasi keterlibatan masyarakat, identifikasi karakteristik masyarakat yang terlibat serta evaluasi mengenai kinerja pelaksanaan PNPM Pariwisata.

**Kata Kunci:** kinerja, PNPM Pariwisata, pengentasan kemiskinan, Desa Wisata Kembangarum, Desa Wisata Pentingsari.

**Abstract:** Poverty is a classic problem that has existed since long time ago. In Indonesia, poverty is a phenomenon that can't be denied. Poverty also occurs in Sleman, one district of DIY, which has a diverse tourism potential. One of the tourism potential in Sleman is tourist village. Between 34 tourist villages in Sleman, there are two tourist villages which have a great visitors, there are Desa Wisata Kembangarum and Desa Wisata Pentingsari. While, the government has launched a PNPM Pariwisata, a program that aims to alleviate poverty through the tourist village. Therefore, the writer interested to research about an outcome of PNPM Pariwisata for poverty alleviation, with the research question, “How does an outcome of PNPM Pariwisata for poverty alleviation in Desa Wisata Kembangarum and Desa Wisata Pentingsari?”. This research using a quantitative approach, so that the data driven from questionnaires and using a random sampling technique. The result of this study is identification of PNPM Pariwisata's programs, identification of community that involved in PNPM Pariwisata, the characteristics of community that involved in PNPM Pariwisata, and the last, evaluation of outcome from PNPM Pariwisata for poverty alleviation in Desa Wisata Kembangarum and Desa Wisata Pentingsari.

**Keywords:** outcome, PNPM Pariwisata, poverty alleviation, Desa Wisata Kembangarum, Desa Wisata Pentingsari

## PENDAHULUAN

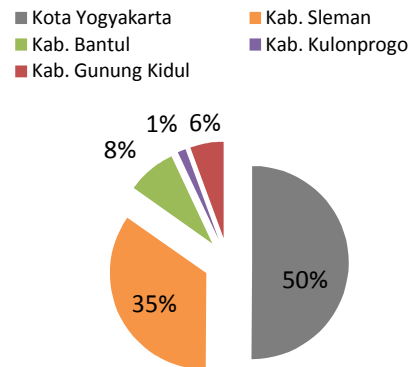
Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang telah ada sejak dahulu. Semua negara di dunia, tak terkecuali negara – negara maju pun juga mengalami permasalahan kemiskinan. Menurut Todaro (2006), terdapat lebih dari 1,2 milyar total dari penduduk dunia yang termasuk dalam kategori penduduk miskin dengan jumlah pendapatan kurang dari US\$ 1 per harinya, dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia yang memiliki jumlah pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari. Tingginya jumlah penduduk yang tergolong miskin tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan fenomena global yang harus mendapatkan perhatian yang lebih intensif.

Di Indonesia sendiri, kemiskinan masih menjadi fenomena yang belum dapat dipungkiri. Berdasarkan data dari WTO (2001), sebanyak 15% masyarakat Indonesia hidup dengan penghasilan di bawah 1 US\$ per harinya. Hal ini diperkuat dengan laporan dari BPS bahwa hingga bulan Maret tahun 2013, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta dengan distribusi penduduk miskin yang terpusat di Pulau Jawa.

Fenomena kemiskinan ini pun juga dialami Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan laporan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tahun 2012, menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman sebesar 10,7% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 116.634 jiwa. Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi ini tentunya akan kontras jika dibandingkan dengan potensi wilayah Sleman yang sangat potensial di sektor pariwisata. Sleman memiliki potensi yang cukup besar sebagai daerah tujuan wisata dengan terdapatnya beragam obyek wisata, baik berupa candi, museum peninggalan sejarah, serta wisata alam berupa daerah pegunungan tinggi di lereng Gunung Merapi. Hal tersebut tentunya menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan, baik wisatawan domestik / lokal maupun wisatawan mancanegara.

Tingginya jumlah wisatawan di Kabupaten Sleman mampu memberikan

sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat bahwa jumlah PAD sub sektor pariwisata Kabupaten Sleman di tahun 2012 menduduki peringkat pertama jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar Rp 53.194.912.852. Jumlah PAD di Kabupaten Sleman juga mampu menyumbang 34,7% dari keseluruhan kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Pariwisata DIY, 2012). Secara jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2013

**Gambar 1**  
Kontribusi PAD Sub Sektor Pariwisata di Provinsi DIY Tahun 2012

Salah satu jenis obyek wisata yang saat ini mulai dikembangkan di Kabupaten Sleman adalah desa wisata. Desa wisata merupakan kesatuan dari kumpulan daya tarik wisata, seperti budaya tradisional pedesaan serta pemandangan alam pegunungan yang sejuk. Dari 37 desa wisata di Sleman, terdapat dua desa wisata yang tengah berkembang pesat, yakni Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari. Jumlah wisatawan di dua desa tersebut terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Kedua desa wisata tersebut pun akhirnya mampu meraih berbagai penghargaan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional pada tahun 2012.

Sementara itu, mulai tahun 2007 yang lalu, pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, dimana PNPM Pariwisata ini

merupakan bagian dari PNPM Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja. Melalui PNPM Mandiri, pemerintah melibatkan unsur masyarakat yang lebih besar, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga pada tahap monitoring dan evaluasi program. Masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembangunan, melainkan mulai berperan sebagai subyek atau pelaku pembangunan dalam kaitannya program penanggulangan kemiskinan. Melalui proses pembangunan yang lebih partisipatif ini, pemerintah juga berharap akan adanya terbentuknya kesadaran dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong miskin.

Sama halnya dengan PNPM Mandiri yang lain, PNPM Pariwisata juga bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat. PNPM Pariwisata bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui program desa wisata. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berupa penyaluran dana bantuan desa wisata, yang ditujukan untuk kelompok masyarakat sebagai pelaku dan pengelola desa wisata.

Oleh karena itu, tentunya diperlukan kajian mengenai kinerja PNPM Pariwisata dalam mengentaskan kemiskinan melalui pelaksanaan program desa wisata. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk dilakukan penelitian, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian *"Bagaimana kinerja pelaksanaan PNPM Pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman?"*.

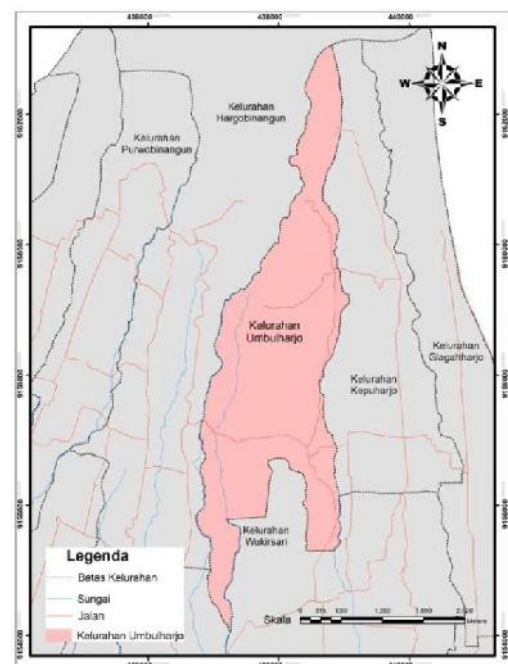
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja PNPM Pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan tahapan sasaran yang harus dapat tercapai. Tahapan sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi PNPM Pariwisata beserta program kegiatannya di Desa Wisata

Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari.

- 2) Mengidentifikasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari.
- 3) Menganalisis karakteristik masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari.
- 4) Mengevaluasi kinerja dari PNPM Pariwisata dalam hal upaya pengentasan kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari.

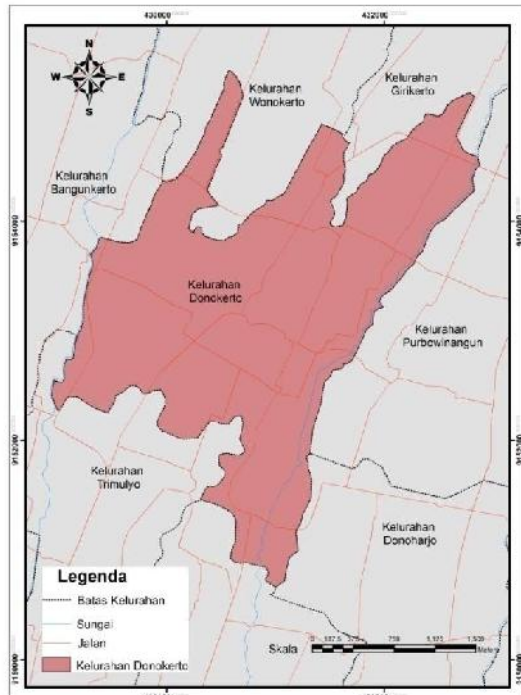
Wilayah penelitian terdiri dari dua wilayah, yakni Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari yang secara administratif terletak di Kabupaten Sleman DIY. Berikut Peta Desa Wisata Kembangarum:



Sumber: RTRW Kabupaten Sleman, 2011

**Gambar 2**  
**Peta Lokasi Kelurahan Umbulharjo**

Sementara untuk Desa Wisata Pentingsari adalah sebagai berikut:



Sumber: RTRW Kabupaten Sleman, 2011

**Gambar 3**  
Peta Lokasi Kelurahan Donoharjo

## KAJIAN LITERATUR

### Definisi Evaluasi

Menurut Suharsimi dalam Karding (2008), arti kata evaluasi bersumber dari terjemahan *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, yaitu *to find out; decide amount of value*, yang berarti sebuah upaya yang bertujuan untuk menilai dan membandingkan sesuatu. Menurut Caesara (2010), evaluasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, serta dampak kegiatan program atau proyek. Bappenas (2007) juga mengemukakan bahwa evaluasi merupakan penilaian sistematis dari program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis terhadap relevansi, efektivitas biaya, serta keberhasilannya untuk kelompok sasaran program. Sementara itu, menurut Widoyoko dalam Saptono (2013), diperlukannya evaluasi dalam suatu program dapat bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan suatu program berdasarkan dari segi efektivitasnya pada program yang sedang berlangsung ataupun yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah penilaian suatu program baik secara obyektif dan sistematis berdasarkan informasi dan hasil analisis untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, serta keberhasilan program, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Tahapan dalam mengevaluasi suatu program memiliki beberapa jenis. Menurut Solihin (2009), tahapan dalam evaluasi secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), dan tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*). Evaluasi tahap perencanaan memiliki fokus pada penentuan prioritas terhadap kemungkinan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Evaluasi pada tahap pelaksanaan lebih menitikberatkan pada analisis mengenai sejauh mana program terlaksana dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan lebih terfokus pada analisis mengenai hasil pelaksanaan program dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut.

Selanjutnya, menurut Bridgman dan Davis dalam Karding (2008), obyek yang akan dievaluasi dalam suatu program memiliki empat indikator, yang terdiri dari indikator *input*, proses, *output*, dan juga *outcomes* yang terdapat di dalam program tersebut. Hal tersebut senada dengan Setiawan (1999), yang mengemukakan bahwa indikator utama dalam mengevaluasi suatu program terletak pada hasil, manfaat, dan dampak dari program tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini merupakan jenis evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*), yaitu pasca pelaksanaan program kegiatan dari PNPB Pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari, dengan objek yang diteliti berupa hasil dari pelaksanaan PNPB Pariwisata yang telah dilaksanakan di kedua desa wisata tersebut.

### Definisi Kinerja

Kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hasil atau prestasi yang telah dicapai. Istilah kinerja

menurut Mangkunegara dalam Gayatri (2011) berasal dari Bahasa Inggris yaitu *job performance / actual performance*, yang berarti prestasi yang dicapai yang terukur secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sedangkan menurut LAN dalam Solihin (2012), kinerja diartikan sebagai gambaran mengenai pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu program / kegiatan. Dari beberapa definisi mengenai kinerja, maka dapat disimpulkan bahwasanya kinerja dapat diartikan sebagai hasil / prestasi yang dihasilkan dalam suatu program / pekerjaan.

Untuk dapat menilai suatu kinerja dari kebijakan / program, maka dibutuhkan sebuah indikator kinerja. Indikator kinerja menurut Solihin (2012) adalah penjabaran pencapaian dari sasaran dan tujuan program baik secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Indikator kinerja memiliki peranan penting dalam suatu program, baik di dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, ataupun di dalam monitoring dan evaluasi (Solihin, 2009). Indikator kinerja tersebut dapat diukur secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mempermudah dalam menilai kemajuan dan keberhasilan program dalam mencapai sasaran dan tujuan dari program itu sendiri. Secara jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Solihin, 2009

**Gambar 4**  
Kedudukan Indikator Kinerja dalam Program

### Definisi Pariwisata

*Institute of Tourism in Britain* (sekarang *Tourism Society in Britain*) dalam Kusmayadi (2000) mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas bepergian orang – orang dalam jangka waktu yang pendek ke tempat lain, selain tempat tinggal dan tempat bekerjanya sehari – hari tanpa ada tujuan untuk mencari nafkah.

*World Tourism Organization* (2001) mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas bepergiannya seseorang di luar lingkungan kebiasaannya dengan periode waktu yang spesifik dimana tujuan utama bepergian tersebut dengan melakukan aktivitas dengan membayar tempat yang dikunjunginya. Hal ini senada dengan Matthieson dan Wall (1982) yang mendefinisikan pariwisata sebagai pergerakan orang sementara dengan tujuan diluar tempat kerja dan tempat tinggalnya, dengan aktivitas yang dilakukan selama ia tinggal di tempat tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

### Definisi Usaha Pariwisata

Menurut Ismayanti (2010), usaha pariwisata dapat didefinisikan sebagai usaha yang menyediakan kebutuhan bagi wisatawan, baik berupa barang maupun layanan jasa dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Dalam UU RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa jenis usaha yang termasuk dalam usaha pariwisata digolongkan sebagai berikut:

- Usaha jasa pariwisata, meliputi: jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran; jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata.
- Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, yang meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarannya.
- Usaha sarana pariwisata, meliputi: penyediaan akomodasi; penyediaan makan dan minum; penyediaan angkutan wisata; dan penyediaan sarana wisata tirta.



### Dampak Pariwisata

Bryden dalam (Soekadijo, 1996) merumuskan lima dampak pariwisata yang menguntungkan yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan valuta sebagai penyumbang neraca pembayaran.
2. Mengembangkan pembangunan ke daerah non industri.
3. Menciptakan kesempatan kerja.
4. Menghasilkan *multiplier effect* khususnya dalam pembangunan ekonomi,
5. Memperluas pemahaman masyarakat terhadap masalah global.

Kadt (1979) mengemukakan mengenai dampak pariwisata yang ditinjau dari aspek perekonomian dan juga kesejahteraan sosial. Menurutnya, pariwisata memiliki dampak yang baik dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan juga kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini juga berimbas pada peningkatan pendapatan dan standar hidup jika dibandingkan dengan bekerja di sektor lain. Dampak utama dari pariwisata, baik dampak positif maupun dampak negatifnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tujuan wisata tersebut. Ia juga berpendapat bahwa dampak pariwisata dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat erat hubungannya dengan pendapatan masyarakat serta distribusi pendapatannya.

### Definisi PNPM Pariwisata

PNPM Pariwisata merupakan salah satu bagian pelaksanaan dari PNPM Mandiri yang memiliki fokus kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat luas. PNPM Pariwisata termasuk dalam kategori PNPM – Penguatan, yakni program pemberdayaan masyarakat yang berbasis sektoral dan kewilayahan. Pelaksanaan PNPM Pariwisata mengacu pada kerangka induk kebijakan PNPM Mandiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18 /HM.001 /MKP /2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata

Sama seperti PNPM lainnya, PNPM Pariwisata juga menggunakan pola pemberdayaan masyarakat melalui

penyaluran Bantuan Desa Wisata (BDW) kepada kelompok masyarakat. Bantuan Desa Wisata ini diprioritaskan kepada masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja di bidang kepariwisataan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata, peningkatan apresiasi seni budaya tradisional, serta dapat mengembangkan kapasitas masyarakat.

### Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena multidimensional. Kemiskinan pada umumnya dikaitkan dengan aspek ekonomi, dimana kemiskinan ini sering diartikan sebagai keadaan yang berada di bawah nilai standar kebutuhan minimum yang dihitung berdasarkan tingkat konsumsi kebutuhan makanan dan juga kebutuhan non makanan. Chambers (2006) menjabarkan bahwa terdapat beberapa perspektif mengenai apa yang dimaksud dengan kemiskinan yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama memandang kemiskinan berdasarkan rendahnya tingkat pendapatan.
- b. Kelompok kedua lebih melihat bagaimana kemiskinan dilihat melalui rendahnya pemenuhan kualitas akses atau tidak tercapainya pemenuhan terhadap akses pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini, dapat dikatakan kemiskinan sebagai ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang dimaksud seperti kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian, dan transportasi pribadi.
- c. Kelompok ketiga memandang kemiskinan melalui sebuah *capability deprivation*, yakni berkenaan dengan hilangnya kemampuan manusia dalam bersosialisasi, seperti contohnya hilangnya kemampuan fisik untuk bekerja / menderita sakit, serta kaitannya dengan permasalahan sosial, seperti rendahnya pengakuan penghormatan seseorang di dalam hubungan antar masyarakat.

Dari beberapa definisi mengenai kemiskinan di atas, maka definisi kemiskinan yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi kemiskinan yang diungkapkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dimana kemiskinan dibedakan berdasarkan basis keluarga. Pengambilan definisi ini dimaksudkan untuk lebih menggali kondisi kemiskinan secara lebih akurat di wilayah penelitian dengan basis keluarga miskin.

BKKBN (2003) memberikan definisi kemiskinan yang melingkupi basis keluarga, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum (pangan, sandang, papan).
2. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang sudah memenuhi kebutuhan dasar minimum, meliputi pangan, sandang, papan serta pelayanan kesehatan.
3. Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan minimum serta kebutuhan sosial psikologis, namun belum memenuhi kebutuhan pengembangannya.
4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan minimum, kebutuhan sosial psikologis, serta kebutuhan pengembangan, namun belum ikut aktif dalam hubungan kemasyarakatan di lingkungannya.
5. Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan minimum, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan, serta sudah dapat turut serta secara aktif dalam hubungan kemasyarakatan di lingkungannya.

Keluarga yang termasuk dalam keluarga miskin adalah golongan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I. KPS merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, namun belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio-psikologis, seperti dalam pemenuhan

kebutuhan pendidikan, interaksi dalam masyarakat dan akses terhadap transportasi.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif sehingga data yang didapatkan berasal dari kuesioner deskripsi melalui data-data serta literatur.

Menurut Slamet (2008), penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang memiliki alur pemikiran positivisme, dimana menekankan pandangan objektivitas secara universal dengan didahului oleh sebuah teori, serta menekankan penggunaan metode statistik untuk mencari jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif juga sering disebut dengan pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang berawal dari sebuah teori dasar, sehingga didapatkan hasil akhir berupa pembuktian hasil penelitian dari teori yang digunakan tersebut.

Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*. Dalam menentukan jumlah sampel populasi penelitian, maka akan dihitung dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Sumber : Kusmayadi, 2000

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Taraf Kesalahan (*error*)

\*dapat sebesar 1%, 5%, ataupun 10%

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan dengan ketelitian/taraf kesalahan sebesar 5%, dimana ukuran populasi (N) di Desa Kembanarum sebesar 86 KK dan ukuran populasi (N) di Desa Pentingsari sebesar 126 KK. Sehingga penghitungan sampel penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

**TABEL I**  
**PENGHITUNGAN SAMPEL PENELITIAN**

Desa Wisata Kembangarum	Desa Wisata Pentingsari
<p>Hasil akhir = 70,07; maka dibulatkan menjadi 70.</p> <p>*Sehingga Jumlah sampel populasi di Desa Wisata Kembangarum sebagai data untuk menunjang penelitian ini berjumlah 70 orang.</p>	<p>Hasil akhir = 98; dibulatkan menjadi 98 .</p> <p>*Sehingga Jumlah sampel populasi di Desa Wisata Pentingsari sebagai data untuk menunjang penelitian ini minimal berjumlah 98 orang. Untuk dapat mempermudah dalam analisis data, maka penyusun menggunakan sampel sebesar 100 orang.</p>

Sumber: Analisis Penyusun, 2014

## HASIL PEMBAHASAN

### Identifikasi Program Kegiatan PNPM Pariwisata

PNPM Pariwisata merupakan salah satu program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. PNPM Pariwisata memiliki fokus kepada pengembangan desa wisata, sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata.

Dalam pelaksanaannya, PNPM Pariwisata menggunakan pola pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai obyek pembangunan, namun telah menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri. Perwujudan dari pengembangan masyarakat dalam PNPM Pariwisata dilakukan melalui penyaluran Bantuan Desa Wisata kepada kelompok masyarakat yang berperan sebagai pengelola desa wisata.

Bantuan Desa Wisata pada awalnya sudah dirancang bersifat stimulan, sehingga diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya serta memperluas kesempatan

kerja dalam usaha pariwisata. Dana Bantuan Desa Wisata juga diprioritaskan pada kegiatan yang berifat kolektif, pelatihan, serta langsung menyentuh pada masyarakat miskin.

Pelaksanaan kegiatan PNPM Pariwisata meliputi beberapa tahapan, sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi Pemangku Kepentingan.

Dalam tahapan ini, sosialisasi dilakukan secara luas, dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata maupun oleh Konsultan Manajemen Nasional (KM-Nasional) yang ditunjuk. Sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota, Konsultan Manajemen Wilayah PNPM Mandiri Pariwisata, Pelaku PNPM Mandiri yang lain, Tim Teknis, Fasilitator Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan, serta LKM.

#### 2. Tahap Pendampingan.

Tahap pendampingan ini juga terdiri dari beberapa bentuk kegiatan, yaitu orientasi lapangan, sosialisasi masyarakat desa/kelurahan penerimaan PNPM Pariwisata, rebug kesiapan masyarakat, pembentukan atau kaji ulang kelembagaan, penentuan prioritas kegiatan dan pembentukan kelompok, penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok, serta verifikasi dan pengiriman RUK. Secara rincinya sebagai berikut:

- Orientasi lapangan dilakukan oleh fasilitator dengan tujuan untuk pengumpulan informasi sekaligus untuk memetakan kebutuhan dan strategi dala pelaksanaan PNPM Pariwisata di desa wisata. Hasil dari orientasi lapangan meliputi profil desa, potensi ekonomi, serta potensi pariwisata yang terdapat di dalam desa wisata. Dalam pelaksanaannya, orientasi lapangan tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat.



- Dalam tahapan sosialisasi masyarakat desa ini, peran fasilitator sangat penting dalam proses *transfer of knowledge* mengenai pelaksanaan PNPM Pariwisata di lingkup desa/kelurahan. Selain itu, fasilitator juga dapat menjelaskan mengenai pentingnya sinergitas antara program kegiatan PNPM Pariwisata dengan program lain yang memiliki tujuan dalam penanggulangan kemiskinan serta keberlanjutan dari program tersebut.
- Rembug kesiapan masyarakat dilakukan setelah sosialisasi dilaksanakan. Peran fasilitator dalam kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam menentukan kesepakatan masyarakat dalam persetujuan maupun penolakan PNPM Pariwisata. Apabila dihasilkan persetujuan untuk menerima PNPM Pariwisata, maka masyarakat harus bersedia memberikan dukungan swadaya dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan program dari PNPM Pariwisata.
- Dalam kegiatan pembentukan atau kaji ulang kelembagaan ini, fasilitator beserta dengan tim teknis dan perangkat desa melakukan penyusunan kelembagaan yang memiliki tanggung jawab saat program kegiatan akan dilaksanakan.
- Penentuan prioritas kegiatan dan pembentukan kelompok dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan asas kebermanfaatan terhadap masyarakat miskin. Penentuan prioritas tersebut dilakukan dengan musyawarah dan difasilitasi oleh fasilitator.
- Penyusunan RUK dilakukan berdasarkan hasil penentuan prioritas kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan setelah itu, proses verifikasi dan pengiriman RUK dilakukan oleh tim teknis serta

LKM dengan pendampingan dari fasilitator.

### 3. *Pencairan Bantuan Desa Wisata*

Pencairan Bantuan Desa Wisata dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui rekening milik LKM/BKM desa. Hal ini dilakukan setelah RUK diverifikasi oleh tim teknis Kabupaten/Kota dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkup Pariwisata Kabupaten/Kota.

### 4. *Pelaksanaan Kegiatan PNPM Pariwisata.*

Setelah Dana Bantuan Desa Wisata diterima oleh kelompok masyarakat, maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati secara bersama.

### 5. *Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan.*

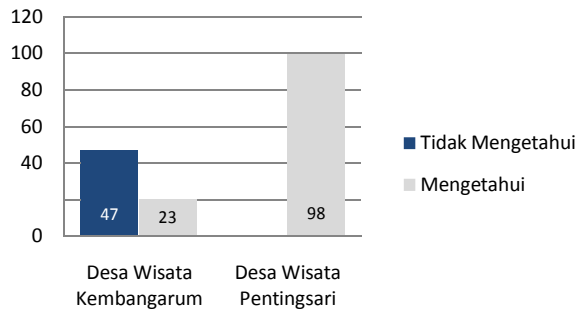
Pelaporan pelaksanaan kegiatan PNPM Pariwisata dilaksanakan secara berjenjang, meliputi laporan pertanggungjawaban kelompok masyarakat kepada LKM, laporan pertanggungjawaban LKM kepada Pemerintah Desa, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Konsultan Manajemen, serta laporan dari tim teknis Kabupaten/Kota kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

### *Identifikasi Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Usaha Pariwisata*

#### **a. Pengetahuan Masyarakat terhadap PNPM Pariwisata**

Sebagai program pengentasan kemiskinan yang memiliki fokus terhadap pengembangan desa wisata di level terendah, yakni tingkat desa/kelurahan, seharusnya PNPM Pariwisata sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat desa wisata. Namun hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menarik, terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap PNPM Pariwisata di wilayah

penelitian, secara jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

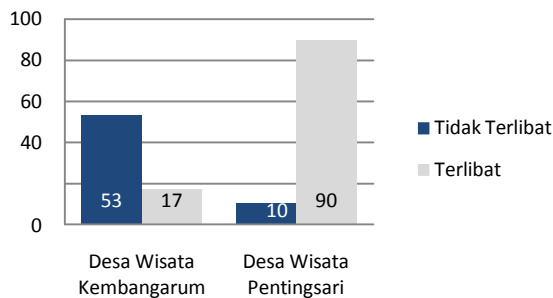


Sumber : Hasil Kuisisioner, 2014

**Gambar 5**  
Pengetahuan Masyarakat Mengenai PNPM Pariwisata

**b. Keterlibatan Masyarakat dalam PNPM Pariwisata**

Keterlibatan masyarakat desa dalam program kegiatan PNPM Pariwisata dapat menjadi tolak ukur mengenai keberhasilan dan keefektifan PNPM Pariwisata. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yang menjelaskan bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam program dan kegiatan PNPM Pariwisata merupakan inti dari PNPM Pariwisata itu sendiri (Putri, 2013). Keterlibatan masyarakat di wilayah penelitian secara jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



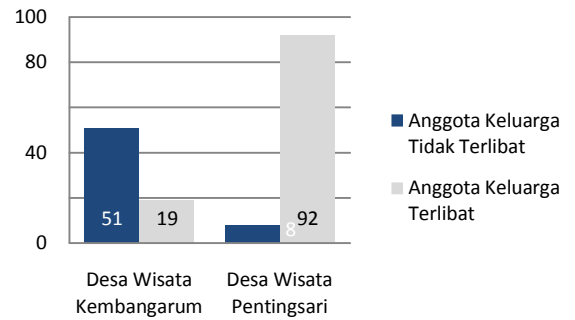
Sumber : Hasil Kuisisioner, 2014

**Gambar 6**  
Keterlibatan Masyarakat Dalam PNPM Pariwisata

**c. Keterlibatan Anggota Keluarga dalam PNPM Pariwisata**

Selanjutnya, dalam keterlibatan anggota keluarga dalam pelaksanaan program kegiatan PNPM Pariwisata di wilayah

penelitian, secara jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

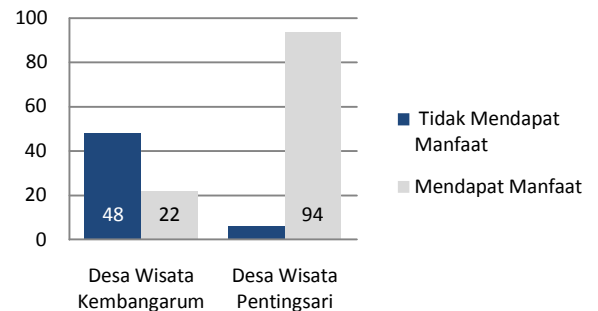


Sumber : Hasil Kuisisioner, 2014

**Gambar 7**  
Keterlibatan Anggota Keluarga Dalam PNPM Pariwisata

**d. Manfaat dari Adanya PNPM Pariwisata**

Penelitian ini juga mengkaji mengenai pandangan responden mengenai manfaat yang didapat dari adanya PNPM Pariwisata, secara jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

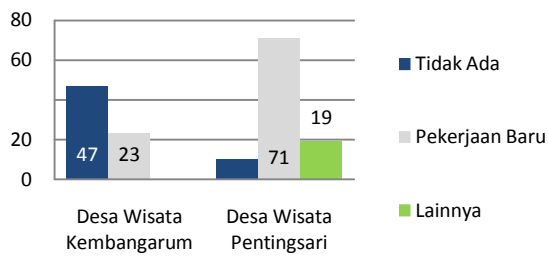


Sumber : Hasil Kuisisioner, 2014

**Gambar 8**  
Pandangan Responden Terhadap Kebermanfaatan PNPM Pariwisata

**e. Bentuk Manfaat dari Adanya PNPM Pariwisata**

Topik ini merupakan kelanjutan dari topik sebelumnya, yaitu mengenai bentuk manfaat yang didapatkan dari PNPM. Bentuk manfaat dari adanya PNPM Pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari menurut hasil kuisisioner cukup beragam, secara jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



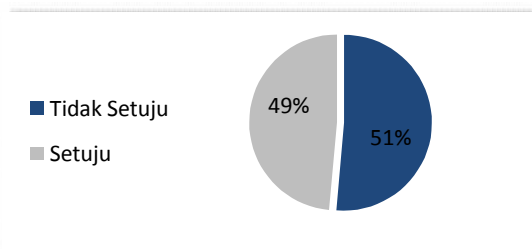
Sumber : Hasil Kuisisioner, 2014

Gambar 9

**Pandangan Responden Terhadap Bentuk Manfaat yang Diterima Dalam PNPM Pariwisata**

**f. PNPM Pariwisata Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan**

Topik ini menggambarkan pandangan masyarakat terhadap PNPM Pariwisata, kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan di wilayah penelitian, secara jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber : Hasil Kuisisioner, 2014

Gambar 10

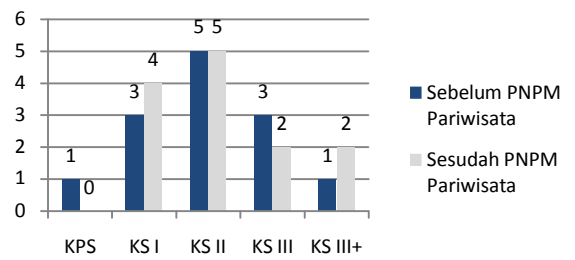
**Pandangan Responden di Desa Kembangarum Terhadap Dalam PNPM Pariwisata dalam Pengentasan Kemiskinan**

*Analisis Karakteristik Masyarakat yang Terlibat dalam Kegiatan Usaha Pariwisata*

Selanjutnya, dalam hal analisis karakteristik masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha Pariwisata ini akan membahas mengenai beberapa karakteristik, yang meliputi: kondisi perekonomian, kondisi keluarga, serta hubungan responden di dalam masyarakat. Hal ini telah disesuaikan dengan paradigma mengenai kemiskinan dengan merujuk pengertian kemiskinan yang dikemukakan oleh BKKBN (2003), bahwasanya kemiskinan dikelompokkan atas basis keluarga (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I).

▪ **Penggolongan Keluarga dari Masyarakat yang Terlibat dalam PNPM Pariwisata di Desa Wisata Kembangarum**

Penggolongan keluarga dari masyarakat yang terlibat dalam PNPM Pariwisata di Desa Wisata Kembangarum yang berjumlah 17 orang, dapat dilihat pada Gambar berikut:



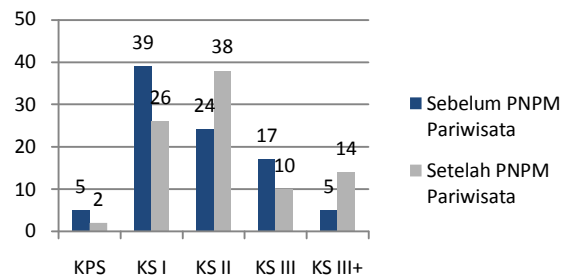
Sumber : Hasil Kuisisioner, 2014

Gambar 11

**Tipe Keluarga dari Masyarakat yang Terlibat PNPM Pariwisata di Desa Wisata Kembangarum**

▪ **Penggolongan Keluarga dari Masyarakat yang Terlibat dalam PNPM Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari**

Penggolongan keluarga dari masyarakat yang terlibat dalam PNPM Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari yang berjumlah 90 orang, dapat dilihat pada Gambar berikut:



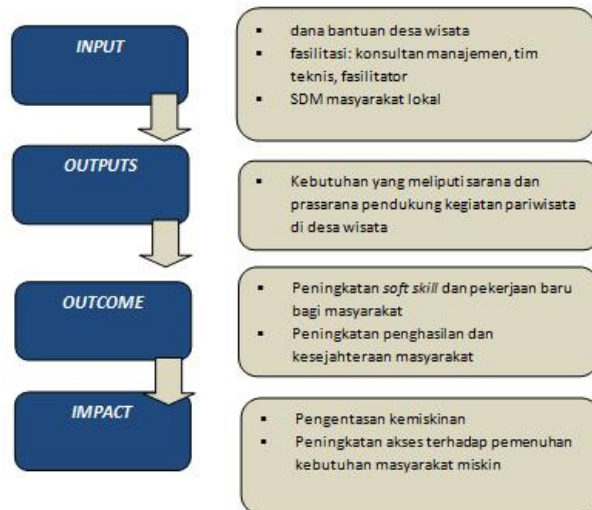
Sumber : Hasil Kuisisioner, 2014

Gambar 12

**Tipe Keluarga dari Masyarakat yang Terlibat PNPM Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari**

### Evaluasi Kinerja Pelaksanaan PNPM Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari

Untuk dapat mengevaluasi kinerja pelaksanaan PNPM Pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka diperlukan pendekatan terlebih dahulu terhadap hubungan antara *input*, *output*, *outcome*, serta *impact* dari program kegiatan PNPM Pariwisata. secara jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

**Gambar 13**

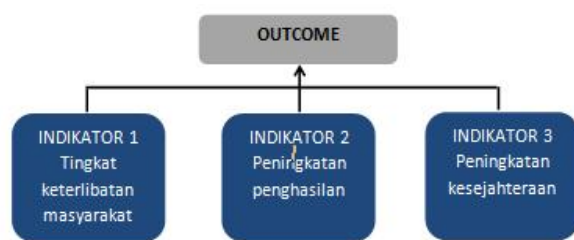
#### Analisis Mengenai *Input*, *Output*, *Outcome* dan *Impact* dari PNPM Pariwisata

Berdasarkan Gambar 13, dapat dilihat bahwasanya *input* dari PNPM Pariwisata berupa komponen fisik dan juga non fisik, dimana *input* tersebut mencerminkan sumberdaya yang nantinya akan menghasilkan *output*. *Input* tersebut yaitu berupa dana bantuan wisata, fasilitasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten, yang meliputi bantuan dalam bentuk konsulan manajemen, tim teknis, serta penyediaan tim fasilitator yang akan mendampingi dalam tahapan perencanaan serta penyelenggaraan program kegiatan PNPM Pariwisata. Kemudian, untuk *output* yang tercipta dari PNPM Pariwisata adalah kebutuhan yang meliputi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata di desa wisata. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana fisik berupa rumah untuk *homestay*,

aula, pembangunan kamar mandi umum, peralatan untuk kuliner dan perlengkapan untuk pertunjukan seni dan budaya (kostum tari, alat musik, *sound system*, gamelan). *Output* tersebut merupakan hal yang dihasilkan dari input kegiatan PNPM Pariwisata. Kemudian *outcome* dari PNPM Pariwisata tersebut adalah peningkatan *soft skill*, peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya pekerjaan baru yang terkait dengan sektor pariwisata di desa wisata. *Outcome* disini mencerminkan manfaat jangka menengah yang merupakan hasil dari bekerjanya aspek *output* dari PNPM Pariwisata. Yang terakhir, yaitu *impact* dari PNPM Pariwisata adalah pengentasan kemiskinan serta peningkatan akses terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. *Impact* ini lebih menekankan pada hasil yang diperoleh dari pencapaian *outcome*.

Dalam penelitian yang berjudul Kinerja Pelaksanaan PNPM Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari ini, maka pembahasan akan terfokus pada *outcome*, dimana *outcome* yang dimaksud adalah hasil / prestasi yang dihasilkan dalam program kegiatan dari PNPM Pariwisata. *Outcome* tersebut dapat berupa peningkatan *soft skill*, peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya pekerjaan baru yang terkait dengan sektor pariwisata di desa wisata.

Selanjutnya, untuk dapat mengevaluasi kinerja pelaksanaan PNPM Pariwisata dalam pengentasan kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari, maka diperlukan adanya penentuan indikator *outcome*. Indikator *outcome* tersebut merupakan hasil survei dari pelaksanaan PNPM Pariwisata di kedua wilayah penelitian, dimana menghasilkan tiga indikator yaitu tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PNPM Pariwisata, peningkatan penghasilan, dan peningkatan kesejahteraan. Secara jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

**Gambar 14**  
**Penentuan Indikator Outcome dalam PNPM**  
**Pariwisata**

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan umum, bahwa PNPM Pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari dapat memberikan dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut terkait dengan peranan sektor pariwisata itu sendiri, dimana sektor pariwisata memiliki potensi untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Namun, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat miskin sebenarnya hanya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sedikit dari sektor pariwisata itu sendiri (Blake 2008; Luvanga 2003).

Berikut merupakan beberapa kesimpulan terkait dengan dampak PNPM Pariwisata terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman yang akan dijabarkan berdasarkan dengan sasaran penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

### 1. Identifikasi PNPM Pariwisata beserta program kegiatannya di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari

PNPM Pariwisata adalah program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang difokuskan pada pengembangan desa wisata. PNPM Pariwisata menggunakan pola pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat, dengan

mengutamakan keterlibatan dari masyarakat miskin. Perwujudan dari pengembangan masyarakat dalam PNPM Pariwisata dilakukan melalui penyaluran Bantuan Desa Wisata kepada kelompok masyarakat yang berperan sebagai pengelola desa wisata.

Program kegiatan PNPM Pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari telah sesuai dengan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata, dimana terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, tahapan pendampingan, tahapan pencairan Bantuan Desa Wisata, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Pariwisata, serta tahapan terakhir yaitu tahapan pelaporan pelaksanaan kegiatan PNPM Pariwisata yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pengelola desa wisata.

### 2. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari dapat dilihat dari keterlibatan individu serta keterlibatan dari anggota keluarga. Dalam keterlibatan individu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Desa Wisata Kembangarum hanya terdapat 24% responden yang menyatakan terlibat, sedangkan di Desa Wisata Pentingsari menunjukkan hasil 90% responden. Sementara untuk keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan usaha pariwisata di Desa Wisata Kembangarum menunjukkan hasil bahwa hanya 27% dari anggota keluarga responden yang terlibat, dan untuk Desa Wisata Pentingsari menunjukkan hasil 92%.

3. *Karakteristik masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari*

Karakteristik dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, yaitu kondisi perekonomian, kondisi keluarga, dan juga hubungan di dalam masyarakat. Terjadi peningkatan dalam hal penghasilan, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar dan sekunder, serta peningkatan dalam hubungan terhadap masyarakat.

Terjadinya perubahan tersebut dapat dilihat pada peningkatan pada golongan Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan juga golongan Keluarga Sejahtera II. Jika pada awalnya Keluarga Pra Sejahtera I sejumlah 5 jiwa, Keluarga Sejahtera I sejumlah 39 jiwa dan juga pada Keluarga Sejahtera II sejumlah 24 jiwa, maka setelah adanya program kegiatan dari PNPM Pariwisata, jumlah Keluarga Pra Sejahtera menjadi 2 jiwa, Keluarga Sejahtera I sejumlah 26 jiwa dan Keluarga Sejahtera II sejumlah 38 jiwa.

4. *Kinerja Pelaksanaan PNPM Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari*

Kinerja pelaksanaan PNPM pariwisata di Desa Wisata Kembangarum dan Desa Wisata Pentingsari dapat dilihat berdasarkan dari indikator keterlibatan masyarakat, peningkatan penghasilan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski menunjukkan hasil yang tidak begitu besar, namun hal tersebut mampu mendorong masyarakat untuk dapat lebih mandiri, dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga akan timbul semangat dari dalam masyarakat itu sendiri untuk dapat memajukan desa wisatanya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dihasilkan suatu rekomendasi yang dapat dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan PNPM Pariwisata di desa wisata untuk dapat memastikan dengan bahwasanya keterlibatan masyarakat miskin harus dapat menjadi fokus utama berkaitan dengan PNPM Pariwisata yang bertujuan untuk dapat menanggulangi kemiskinan dan memberikan kesempatan kerja di dalam pengembangan desa wisata.
2. Kesadaran dari masyarakat untuk dapat ikut terlibat dalam program dan kegiatan dari PNPM Pariwisata merupakan kunci utama dari keberhasilan PNPM Pariwisata, oleh karena itu, diperlukan peran dari pemerintah, ataupun dari tim teknis beserta fasilitator desa wisata, sehingga masyarakat dapat lebih banyak lagi terlibat di dalam pelaksanaan PNPM Pariwisata.
3. Pihak pemerintah dapat memfasilitasi melalui kerjasama antar daerah, baik berupa promosi dan juga peningkatan fasilitas pendukung bagi pengembangan desa wisata, sehingga desa wisata dapat lebih berkembang lagi. Jika desa wisata dapat lebih berkembang, maka akan semakin meningkatkan pendapatan dari desa wisata yang juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dari masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari PNPM Pariwisata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2007. *Kumpulan Bahan Latihan: Pemantauan dan Evaluasi Program – Program Penanggulangan Kemiskinan*.
- Caesara, Anindya, et.all. 2010. "Evaluasi Dampak PNPM Mandiri Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.



- Chambers, Robert. 2006. "What is Poverty? Who asks? Who answers?." *Poverty in Focus*, United Nations Development Program, pp. 3 – 4.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. 2012. *Statistik Kepariwisataaan*. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Gayatri, Titan Erwinia. 2011. "Analisis Motivasi, Kemampuan Kerja dan Kinerja Pegawai Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno." Tesis tidak diterbitkan. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Karding, Abdul Kadir. 2008. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (B OS) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang." Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kusmayadi dan Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: KM.18 / HM.001 / MKP / 2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.
- Saptono, Ari. 2013. "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat)." *EconoSains* Vol XI, Nomor 2, Agustus 2013, Hal. 29 – 54.
- Soekadijo, R.G. 1966. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Solihin, Dadang. 2012. "Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan." Disampaikan pada Capacity Building Biro Hukum Kabupaten Rokan Hilir Kedaton Hotel, Bandung, 30 Oktober 2012.
- \_\_\_\_\_. 2009. "Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan." Disampaikan pada Binteknas Perencanaan Penganggaran dan Jurnis Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Pembangunan Sanur Paradise Plaza Hotel, Denpasar, 21 April 2009.
- Todaro, M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- World Tourism Organization. 2001. "Tourism and Poverty Alleviation." *Report in The High-Level Meeting on Tourism and Development* in LDC's, Gran Canaria, Spain.